

Supriadi, S.H., M.Hum.

# HUKUM KEHUTANAN HUKUM PERKEBUNAN DI INDONESIA



Penerbit

**SINAR GRAFIKA**

# HUKUM KEHUTANAN HUKUM PERKEBUNAN DI INDONESIA

Menurut Biro Hukum dan Organisasi Kehutanan, Hukum Kehutanan adalah kumpulan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang berkaitan dengan hutan dan pengurusannya. Adapun perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. (Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan)

Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan. Diuraikan secara mendetail dan sistematis yang dituangkan dalam kalimat dan bahasa yang sangat komunikatif, sehingga dipahami oleh semua kalangan masyarakat.

Substansi dari buku yang berkualitas ini tertuang dalam beberapa pokok bahasan, meliputi:

- Pengembangan Kehutanan di Indonesia.
- Perencanaan Kehutanan.
- Pengelolaan Hutan.
- *Illegal Logging* dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH).
- Perlindungan Hutan.
- Hutan Kota.
- Gugatan Perwakilan dan Penyelesaian Sengketa Kehutanan.
- Hukum Perkebunan dan Permasalahannya.

## KEISTIMEWAAN BUKU INI

- Berisikan argumentasi secara teoretis-kritis mengenai Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan yang didukung dengan pendapat para pakar dan ide yang brilian dari penulis.
- Penyajiannya disinergikan dengan semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan dan perkebunan.
- Disertai dengan data yang lengkap dan terbaru.

ISBN 979-007-281-3



9 789790 072817  
Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan  
di Indonesia

# Daftar Isi

<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PERKEMBANGAN KEHUTANAN DI INDONESIA .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Sumber Hukum Kehutanan di Indonesia .....	6
C. Pengertian, Asas, dan Tujuan Kehutanan .....	14
D. Status, Fungsi, dan Pengurusan Hutan .....	18
E. Sejarah dan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan .....	22
<b>BAB 2 PERENCANAAN KEHUTANAN .....</b>	<b>31</b>
A. Lembaga Perencanaan Kehutanan .....	31
B. Lembaga Pemerintah dan Lembaga Dunia Bidang Kehutanan .....	32
C. Lembaga <i>Ekolabeling</i> dan Organisasi Internasional Peng-eksport Kayu Tropis (ITTO) .....	34
D. Perencanaan Kehutanan .....	39
E. Inventarisasi Hutan .....	42
F. Pengukuhan Hutan dan Penatagunaan Hutan .....	50
G. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan .....	105
<b>BAB 3 PENGELOLAAN HUTAN .....</b>	<b>113</b>
A. Latar Belakang .....	113

B.	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan .....	116
C.	Pemanfaatan Hutan .....	125
D.	Pemberdayaan Masyarakat Setempat, Hutan Desa, dan Hutan Kemasyarakatan .....	183
E.	Hutan Kemasyarakatan .....	186
F.	Prinsip, Kriteria, Indikator, Pemilihan, dan Penetapan serta Penerapan Sistem Silvikultur .....	195
G.	Penghapusan dan Perpanjangan Izin .....	203
H.	Industri Primer Hasil Hutan .....	207
I.	Manajemen Hutan Lestari .....	228
J.	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan .....	255
<b>BAB 4</b>	<b><i>ILLEGAL LOGGING DAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)</i></b> .....	<b>298</b>
A.	Pengertian dan Modus <i>Illegal Logging</i> .....	298
B.	Modus Terjadinya <i>Illegal Logging</i> .....	303
C.	Pemberantasan <i>Illegal Logging</i> dan Penyulundupan Kayu .....	309
D.	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).....	337
E.	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan .....	353
F.	Perizinan Kehutanan .....	381
<b>BAB 5</b>	<b>PERLINDUNGAN HUTAN</b> .....	<b>385</b>
A.	Latar Belakang .....	385
B.	Mencegah dan Membatasi Kerusakan Hutan oleh Perbuatan Manusia .....	387
C.	Keterlibatan Dunia Usaha dalam Mengelola Hutan Menekan Emisi .....	432
D.	Perlindungan Hutan dari Gangguan Ternak, Daya-Daya Alam, dan Hama Serta Penyakit .....	440
E.	Perlindungan Hutan dari Kebakaran .....	442

F.	Pencegahan, Pemadaman, dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan .....	447
G.	Pengamanan Kehutanan .....	450
H.	Sanksi Pidana, Ganti Rugi dan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan .....	454
I.	Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Kehutanan .....	458
J.	Pengawasan dan Penyerahan Kewenangan .....	463
K.	Masyarakat Hukum Adat dan Peran serta Masyarakat .....	465
L.	Peran serta Masyarakat .....	476
<b>BAB 6</b>	<b>HUTAN KOTA .....</b>	<b>481</b>
A.	Pendahuluan .....	481
B.	Kota Berwawasan Ekologi .....	485
C.	Hutan Kota dan Peranannya .....	495
<b>BAB 7</b>	<b>GUGATAN PERWAKILAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN .....</b>	<b>512</b>
A.	Gugatan Perwakilan .....	512
B.	Penyelesaian Sengketa Kehutanan .....	513
C.	Penyidikan Kehutanan .....	514
D.	Ketentuan Pidana .....	520
E.	Ganti Rugi dan Sanksi Administratif .....	523
F.	Sanksi Administratif Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan .....	540
<b>BAB 8</b>	<b>HUKUM PERKEBUNAN .....</b>	<b>544</b>
A.	Latar Belakang .....	544
B.	Asas, Tujuan, Fungsi, dan Perencanaan Perkebunan .....	546
C.	Penggunaan Tanah untuk dan Usaha Pengelolaan Usaha Perkebunan .....	549

D. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan .....	562
E. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan .....	564
F. Pembinaan, Pengawasan, Penyidikan, dan Ketentuan Pi- dana Perkebunan .....	567
 DAFTAR PUSTAKA .....	 573
GLOSARIUM .....	579
LAMPIRAN .....	589
PROFIL PENULIS .....	705